



2023

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTH (LKjIP) TAHUN 2023

## DINAS PERHUBUNGAN



### DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

JL. NUSA INDAH, PUTUSSIBAU KOTA, KEC. PUTUSSIBAU  
UTARA, KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT  
78753



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan baik.

Kami menyadari LKjIP yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal. Namun kami akan terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Disadari bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap melalui LKjIP Dinas Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini, dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik menuju terwujudnya “**Good Governance**” di lingkungan Dinas Perhubungan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.

Putussibau, Februari 2025  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Kapuas Hulu

**SERLI, S.Sos.,M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671201 198908 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I      PENDAHULUAN	1
A.          GAMBARAN UMUM	1
1.      Pendahuluan	1
2.      Susunan Organisasi	2
3.      Tugas Pokok dan Fungsi	4
4.      Sumber Daya Aparatur (SDA)	13
5.      Sumber Daya Keuangan	14
6.      Sarana dan Prasarana	15
B.      PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)	15
BAB II      PERENCANAAN KINERJA	16
A.          RENSTRA	16
1.      Visi	17
2.      Misi	17
3.      Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU	18
B.          PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA	21
A.          CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B.          REALISASI ANGGARAN	24
C.          REALISASI FISIK	
BAB IV      PENUTUP	31
A. KESIMPULAN	
B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH	
C. LAMPIRAN PAGU ANGGARAN SEMULA DAN SETELAH PERUBAHAN	
	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Pendahuluan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* serta akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 mengacu kepada :

1. Keputusan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 852 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, kepada publik/pemberi mandat (Bupati Kapuas Hulu) yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2024 yang didasari oleh RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

## **2. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan unit pelayanan secara elektronik bahwa merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh:

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Program dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Aparatur.
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
4. UPT;
5. Kelompok Pejabat Fungsional;

Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah:

“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

1. Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Dinas Perhubungan, yang berada dibawa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum teknis Dinas Perhubungan, sesuai dengan kewenangan di bidang perhubungan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Penetapan rencana strategis Dinas Perhubungan,
  - b. Pengoordinasian seluruh kegiatan Dinas Perhubungan dengan instansi lainnya;
  - c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Perhubungan;
  - d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Perhubungan;
  - f. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan secara periodik; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Perhubungan, dipimpin seorang Sekretaris (Eselon III), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas. Adapun Fungsi dari Sekretariat yaitu:
  - a. Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
  - b. Pengoordinasian Penyusunan program kerja Dinas ;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  - d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
  - e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;

- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat dibantu oleh Satu orang Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, dan Satu orang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.

2.1 Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon IV). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas.
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah



tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon IV).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
  - b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
  - c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
  - d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
  - e. Pengelolaan barang milik Dinas;
  - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang (Eselon III) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan jalan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- d. Pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai danau dan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Eselon III) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. dengan dibantu oleh 2 orang Seksi Eselon IV yaitu Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.

Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai danau dan Penyeberangan yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- c. Pembinaan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- d. Pembinaan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- e. Pengembangan sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perhubungan Sungai dan Danau dibantu oleh Pejabat Eselon IV terdiri dari Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.

- 4.1. Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan, mempunyai tugas membantu Bidang Angkutan

Sungai, Danau dan penyeberangan, dalam melaksanakan manajemen lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Manajemen lalu lintas penyeberangan;
  - c. pelaksanaan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan pada jaringan jalan kabupaten dan dalam daerah kabupaten;
  - e. penetapan tarif angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
  - f. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dalam Daerah kabupaten dan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha dan perseorangan;
  - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4.2. Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serta pengelolaan sarana perhubungan sungai dan danau.

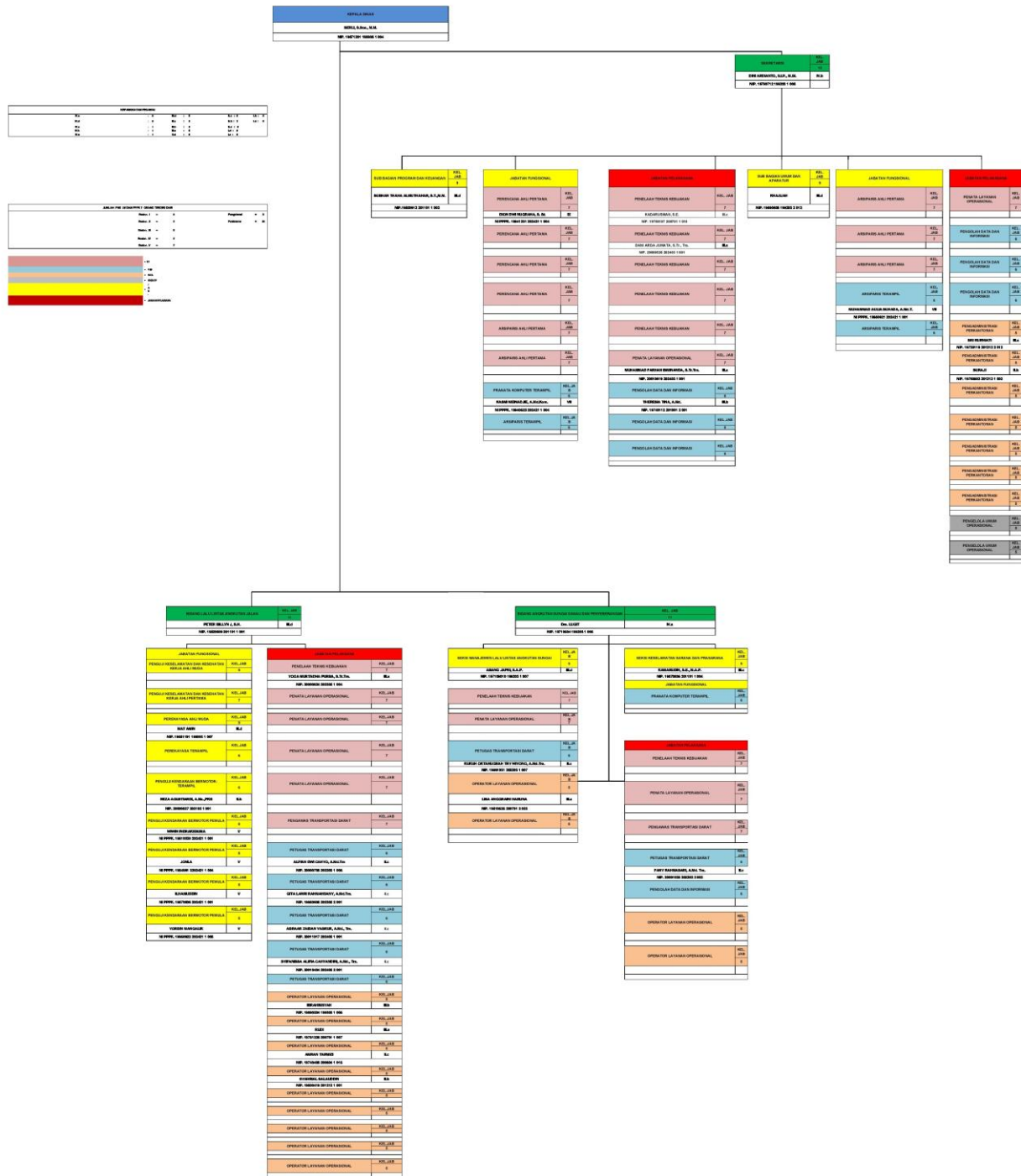
Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;

- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan keselamatan serta sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - c. Pembangunan, pelayanan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai, dan danau;
  - d. Pelayanan izin usaha, izin pengoperasian pelabuhan 24 jam izin pengerukan, izin reklamasi, izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal dan perairan pelabuhan lokal;
  - e. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
  - f. Penetapan rencana induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal, sungai, dan danau;
  - g. Pembinaan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan, Sarana, dan Prasarana; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

BAGAN STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

**PETA JABATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU**



#### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam susunan kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kapuas Hulu yang terdiri dari Jabatan Struktural dan staf dengan jumlah keseluruhan sebanyak 26 orang dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL 1**  
**JUMLAH PEGAWAI PNS BERDASARKAN**  
**PANGKAT/GOLONGAN**

No	Eselon/Non Eselon	PANGKAT/GOLONGAN																	
		Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV					Jumlah
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4
4.	Non Eselon	-	-	-	-	-	1	8	-	6	2	1	1	-	-	-	-	-	19
Jumlah		0	0	0	0	0	1	8	0	6	2	3	4	1	1	1	0	0	27

**TABEL 2**  
**JUMLAH PEGAWAI PPPK BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN**

NO	KELAS JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pemula (5)	V	4
2.	Terampil (6)	VI	-
		VII	2
3.	Mahir (7)	IX	1
Jumlah			7

**TABEL 3****JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Eselon/Non Eselon	SD	Tingkat Pendidikan								Jumlah
			SMP	SMA	D2	D3	D4	S 1	S 2	S 3	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
3.	Eselon IV	-	-	1	-	-	-	1	2	-	4
4.	Non Eselon	-	-	11	1	9	4	1	-	-	26
Jumlah		0	0	12	1	9	1	4	4	0	34

**5. Sumber Daya Keuangan**

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Anggaran Tahun 2024, bersumber dari dana APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan total dana sebesar Rp. 11.291.314.248,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
	APBD 2024	11.291.314.248,-	
A.	Pendapatan Asli Daerah	91.459.000,-	
B.	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	11.291.314.248,-	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	5.436.513.498,-	
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.587.717.750,-	
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	4.267.083.000,-	

**6. Sarana dan Prasarana**

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. *Nilai Aset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2024 adalah Rp. 38.134.957.818,26,-*

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisasi dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu sebagai satu organisasi juga menghadapi dampak langsung ataupun tidak langsung dari perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan itu berupa berbagai aturan yang mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan, faktor internal organisasi, juga faktor- faktor eksternal yang berpengaruh terhadap organisasi Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai unit teknis pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu juga memiliki sejumlah permasalahan-permasalahan, Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perhubungan antara lain :

1. Tuntutan Masyarakat memberikan Pelayanan Prima;
2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi yang pesat tidak dibarengi dengan Peningkatan Kualitas SDM yang ada.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026**

Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan perhubungan, di Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan,

Rencana Strategis yang telah disetujui dan ditetapkan berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis yang disusun dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Perhubungan di Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam mengimplementasikannya perlu ada komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan kejujuran, keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu saja, melainkan oleh seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan *Stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

## 1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kondisi ideal yang ingin dicapai serta memberikan arah dan tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, sekaligus merupakan spirit yang mendorong organisasi agar selalu termotivasi mencapai kondisi ideal yang diharapkan tersebut.

Dengan melihat perkembangan jauh kedepan dimana kendala dan tantangan lebih bervariasi maka perlu mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, didalam mengembangkan peluang secara berkesinambungan agar tidak tertinggal jauh.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, telah menetapkan visi sebagai berikut :

***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas.***

## 2. MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa misi sebagai berikut :

**MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

**MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah**

Luasnya Daerah Kapuas Hulu menuntut peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, yang berkualitas dan berkuantitas, hal itu membutuhkan keterlibatan pemodal (investor) dari luar Kabupaten Kapuas Hulu dan peran serta pengusaha lokal.

Di samping itu letak geografis Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, dengan curah hujan yang tinggi dan struktur tanah yang lembut / lembab menyebabkan biaya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi cukup tinggi, karenanya dibutuhkan keterlibatan pihak lain (swasta) dalam rangka tersedianya sarana dan prasarana transportasi, yang berkualitas dan berkuantitas.

### **3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KERJA UTAMA**

#### **3.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkret dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Adapun tujuan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Tujuan dari misi pertama adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan indikator kinerja untuk mencapai tujuan adalah :  
Nilai Evaluasi SAKIP

2. Tujuan dari misi kedua adalah Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten

Dengan indikator kinerja untuk mencapai tujuan adalah :  
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun.

#### **3.2 SASARAN STRATEGIS**

Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sesuai sumber daya yang dimiliki serta alokasi setiap tahun anggaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam waktu bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
4. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan.

### 3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Nilai Reformasi Birokrasi
2. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4. Rasio Konektivitas Kabupaten yang meliputi Jumlah Angkutan Umum LAIK jalan dan Jumlah Prasarana dalam kondisi baik

#### B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Penetapan Kinerja (TapKin) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2024 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan Perjanjian Kerja dengan Bupati Kapuas Hulu. Formulir Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (ANGGARAN PERUBAHAN)**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat.	86,9
3	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	% Jumlah Angkutan Umum yang LAIK Jalan	90,04 %
4	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan	% Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	86%

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 5.436.513.498,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 1.587.717.750,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 4.267.083.000,-	APBD

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Anggaran Perubahan) Tahun Anggaran 2024, realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel : Penyajian Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi		Tahun (n)			Realisasi s/d tahun (n)	Target akhir renstra
				(n-2)	(n-1)	Target	Realisasi	% Capaian kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi SAKIP	nilai	B	B	BB	B	50	B	BB
2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Angka kecelakaan lalu lintas	Angka	-	-	< 10	12	1,2	12	< 10
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	79	85	79	92	79	85
		% Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	-	75	75	75	100	75	80
		% Angkutan Umum LAIK jalan	%	-	90	90	90	100	90	90

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

- Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP dengan Target B, telah terealisasi dengan capaian kinerja 100% dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja Nilai Evaluasi SAKIP tercapai dengan Nilai Evaluasi BB Berdasarkan Hasil Evaluasi tahun 2024.

target akhir Renstra telah mencapai target yang ditetapkan yaitu BB  
Faktor yang menunjang peningkatan pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

- a. Tersedianya Anggaran;
- b. Melakukan koordinasi dengan bidang/seksi dan instansi terkait;
- c. Adanya dukungan dari *stakeholders*.

Faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan prioritas kebutuhan;
- b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan
- c. Pembinaan personil/petugas

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Sasaran strategis Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas
  - Indikator kinerja Angka Keselamatan lalu lintas < 10 dengan capaian 12 kecelakaan berlalu lintas berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kabupaten Kapuas Hulu. Angka Keselamatan lalu lintas meningkat dibandingkan tahun 2023. Dengan angka kecelakaan 12 berarti tidak mencapai target dari yang ditetapkan yaitu < 10
3. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan
  - Indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 92% yaitu sebesar 79 dari target yang ditetapkan sebesar 85

berdasarkan hasil Survei yang dilakukan di tahun 2024 yaitu sebesar nilai 85

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 85 dari target yang ditetapkan

- Indikator kinerja % Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik tercapai 100% yaitu sebesar 75% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, pada tahun 2024 pembangunan prasarana perhubungan yang dilakukan yaitu pengadaan lampu penerangan jalan umum, Pembangunan rambu-rambu lalu lintas dan Pembangunan tambatan perahu/lanting.

Pada Tahun 2024 pencapaian kinerja mencapai target kinerja dengan target akhir renstra mencapai 90% dari target yang ditetapkan

- Indikator kinerja % Angkutan Umum LAIK Jalan tercapai 100% yaitu sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

Pada tahun 2024 pencapaian kinerja mencapai target kinerja dengan target akhir renstra mencapai 90% dari target yang ditetapkan

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut

- a. Masih terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) di bidang teknis perhubungan baik secara kualitas maupun kuantitas ;
- b. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap hukum di Bidang Perhubungan (Darat, Sungai, Danau dan penyeberangan).
- c. Masih lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan sehingga keterpaduan pelayanan kepada masyarakat belum optimal baik di bidang operasional maupun di bidang usulan pembangunan.
- d. Masih terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan untuk melaksanakan program dan kegiatannya

Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas, dilakukan dengan cara :

1. Mengikutsertakan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu melalui Diklat-Diklat teknis Perhubungan, sebagai upaya meningkatkan SDM.



2. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan setiap tahun serta penyuluhan-penyuluhan di bidang tertib transportasi.
3. Penambahan dana pembangunan baik dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
4. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten dan pihak swasta.

Faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan prioritas kebutuhan;
- b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan
- c. Pembinaan personil/petugas

Program yang menunjang untuk pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3. Program Pengelolaan Pelayaran

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

REALISASI ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE IV TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Anggaran	Sisa Anggaran
		(Rp.)		(Rp.)	(%)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Rp5.436.513.498,00</b>	<b>DAU</b>	<b>Rp5.307.076.476,00</b>	<b>97,62%</b>	<b>Rp129.437.022,00</b>
<b>A.</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp9.949.000,00	DAU	Rp9.949.000,00	100,00%	Rp0,00
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp1.408.000,00	DAU	Rp1.408.000,00	100,00%	Rp0,00
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp1.518.000,00	DAU	Rp1.518.000,00	100,00%	Rp0,00

c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp2.393.000,00	DAU	Rp2.393.000,00	100,00%	Rp0,00
d.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp3.102.000,00	DAU	Rp3.102.000,00	100,00%	Rp0,00
e.	Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.528.000,00	DAU	Rp1.528.000,00	100,00%	Rp0,00
<b>B.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp3.046.129.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>Rp2.918.463.642,00</b>	<b>95,81%</b>	<b>Rp127.665.358,00</b>
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.833.385.000,00	DAU	Rp2.705.719.642,00	95,49%	Rp127.665.358,00
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp211.860.000,00	DAU	Rp211.860.000,00	100,00%	Rp0,00
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp884.000,00	DAU	Rp884.000,00	100,00%	Rp0,00

C.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp94.210.000,00	DAU	Rp94.186.300,00	99,97%	Rp23.700,00
a.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp94.210.000,00	DAU	Rp94.186.300,00	99,97%	Rp23.700,00
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp104.213.000,00	DAU	Rp104.185.926,00	99,97%	Rp27.074,00
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp28.416.000,00	DAU	Rp28.416.000,00	100,00%	Rp0,00
b.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp2.358.000,00	DAU	Rp2.358.000,00	100,00%	Rp0,00
c.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp625.000,00	DAU	Rp625.000,00	100,00%	Rp0,00
d.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Rp72.814.000,00	DAU	Rp72.786.926,00	99,96%	Rp27.074,00
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp809.380.000,00	DAU	Rp806.882.344,00	99,69%	Rp2.497.656,00

a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.350.000,00	DAU	Rp5.350.000,00	100,00%	Rp0,00
b.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp54.035.000,00	DAU	Rp54.035.000,00	100,00%	Rp0,00
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp40.775.000,00	DAU	Rp40.775.000,00	100,00%	Rp0,00
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp9.600.000,00	DAU	Rp7.200.000,00	75,00%	Rp2.400.000,00
e.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp5.560.000,00	DAU	Rp5.560.000,00	100,00%	Rp0,00
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp672.260.000,00	DAU	Rp672.162.344,00	99,99%	Rp97.656,00
g.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp5.000.000,00	DAU	Rp5.000.000,00	100,00%	Rp0,00
h.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp16.800.000,00	DAU	Rp16.800.000,00	100,00%	Rp0,00
G.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan	Rp940.413.009,00	DAU	Rp938.982.621,00	99,85%	Rp1.430.388,00

	Pemerintah Daerah					
a.	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Rp5.000.000,00	DAU	Rp5.000.000,00	100,00%	Rp0,00
b.	Penyedia Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Rp83.160.560,00	DAU	Rp83.043.964,00	99,86%	Rp116.596,00
c.	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp852.252.449,00	DAU	Rp850.938.657,00	99,85%	Rp1.313.792,00
E.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Rp432.219.489,00	DAU	Rp432.026.645,00	99,96%	Rp192.844,00
a.	Penyedia Jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Rp381.069.489,00	DAU	Rp380.883.145,00	99,95%	Rp186.344,00
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp21.150.000,00	DAU	Rp21.143.500,00	99,97%	Rp6.500,00

c.	Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Rp30.000.000,00	DAU	Rp30.000.000,00	100,00%	Rp0,00
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>Rp1.587.717.750,00</b>	<b>DAU &amp; DAK</b>	<b>Rp1.362.469.388,00</b>	<b>85,81%</b>	<b>Rp225.248.362,00</b>
A.	Perencanaan Rencana Induk LLAJ Kabupaten/Kota	Rp0,00	DAU	Rp0,00	-	Rp0,00
a.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp0,00	DAU	Rp0,00	-	Rp0,00
A.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp1.074.865.750,00	DAU	Rp874.311.588,00	81,34%	Rp200.554.162,00
a.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp130.000.000,00	DAU	Rp129.826.700,00	99,87%	Rp173.300,00
b.	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Rp303.750.000,00	DAU	Rp303.717.000,00	99,99%	Rp33.000,00

c.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp641.115.750,00	DAU	Rp440.767.888,00	68,75%	Rp200.347.862,00
B.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp37.950.000,00	DAU	Rp37.950.000,00	100,00%	Rp0,00
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Rp37.950.000,00	DAU	Rp37.950.000,00	100,00%	Rp0,00
C.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp15.000.000,00	DAU	Rp0,00	0,00%	Rp15.000.000,00
a.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp15.000.000,00	DAU	Rp0,00	0,00%	Rp15.000.000,00



D.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp109.902.000,00	DAU	Rp109.336.100,00	99,49%	Rp565.900,00
a.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp109.902.000,00	DAU	Rp109.336.100,00	99,49%	Rp565.900,00
E.	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp350.000.000,00	DAU	Rp340.871.700,00	97,39%	Rp9.128.300,00
a.	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp350.000.000,00	DAK	Rp340.871.700,00	97,39%	Rp9.128.300,00
3.	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>Rp4.267.083.000,00</b>	<b>DAU &amp; DAK</b>	<b>Rp371.249.667,00</b>	<b>8,70%</b>	<b>Rp3.895.833.333,00</b>

A.	Penerbitan Izin Usaha Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kab/Kota	Rp45.370.000,00	DAU	Rp45.012.800,00	99,21%	Rp357.200,00
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kab/Kota	Rp45.370.000,00	DAU	Rp45.012.800,00	99,21%	Rp357.200,00

B.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau Sesuai dengan domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten /Kota	Rp55.050.000,00	DAU	Rp54.930.000,00	99,78%	Rp120.000,00
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai dengan domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten /Kota	Rp55.050.000,00	DAU	Rp54.930.000,00	99,78%	Rp120.000,00
C.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp4.166.663.000,00	DAK	Rp271.302.867,00	6,51%	Rp3.895.360.133,00

a.	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp274.200.000,00	DAU	Rp215.903.452,00	78,74%	Rp58.296.548,00
b.	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Rp3.876.713.000,00	DAK	Rp39.874.415,00	1,03%	Rp3.836.838.585,00
c.	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rp15.750.000,00	DAU	Rp15.525.000,00	98,57%	Rp225.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp11.291.314.248</b>			<b>64,04%</b>	<b>Rp4.250.518.717,00</b>

## C. Realisasi Kemajuan Fisik

No.	Program	Kegiatan	Lokasi					Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah	Sumber Dana	Pelaksana					Permasalahan	Solusi	Keterangan		
			Kecamatan	Desa	Dusun	Titik Koordinat							PT/ CV	Dana (Rp.)	Foto							
						X	Y								0%	50%	100%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.008.379.000,00	DAU	-	-	-	-	-	-	-		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	DAU	-	-	-	-	-	-	-		
		- Laptop	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	-	-	1	Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU	CV. MITRA KOMPUTER	9.955.000,00	-	-	-	-	-	
		2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	-	-	1	Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	DAU- APBDP	CV. SAMUDRA LACKSMANA	29.970.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608.119.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608.119.000,00	DAU - APBDP	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Mobil SUV 4x4 ( Mobil Patrol/ Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu )	Putussibau Utara	-	-	-	-	-	-	1	Unit	584.000.000,00	584.000.000,00	DAU - APBDP	PT. GEMLANG BERLIAN INDAH	573.400.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Biaya Modifikasi Aksesoris Tambahan	Putussibau Utara	-	-	-	-	-	-	1	Paket	24.119.000,00	24.119.000,00	DAU - APBDP	CV. TARISA	24.100.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.980.000,00	DAU	CV. MITRA KOMPUTER	34.914.000,00	-	-	-	-	-	-	
		- Mesin Rumpot	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	-	-	1	Unit	5.820.000,00	5.820.000,00	DAU	-	5.797.000,00	-	-	-	-	-	-
		- Pendingin Ruangan	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	-	-	3	Unit	6.800.000,00	19.800.000,00	DAU	-	19.767.000,00	-	-	-	-	-	-
		- TV LED Full HD	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	-	-	1	Unit	9.360.000,00	9.360.000,00	DAU	-	9.350.000,00	-	-	-	-	-	-
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.280.000,00	DAU	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Rehabilitasi Ruangan LLAJ (Pembuatan Ruangan untuk Kepala Bidang LLAJ)	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	112°55'28.17"	0°51'55.81"	-	1	Paket	40.280.000,00	40.280.000,00	DAU	CV. TARISA	40.200.000,00	Terlampir			-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		- Penataan halaman kantor Dinas Perhubungan Kapuas Hulu	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	112°55'28.17"	0°51'55.81"	-	1	Paket	101.000.000,00	101.000.000,00	DAU	CV. TARISA	100.950.000,00	Terlampir			-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		- Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitas Ruangan Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	-	-	1	Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	DAU	CV. GM KONSULTAN	6.937.500,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		- Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitas Ruangan Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	-	-	1	Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	DAU	CV. GM KONSULTAN	10.900.200,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan

35

		Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Terserab di Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	-	1	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	DAU - APSDP	CV. TATA PANDEGA GUMILANG	24.960.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Jasa Konsultasi/Jasa Perencanaan Lampu Penerangan Jalan Umum Untuk Tahun 2023	Terserab di Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	-	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	DAU - APSDP	CV. PANDEGA TATA GUMILANG	49.970.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		<b>c. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>73.200.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Pembangunan Halte Bus	Puting Kencana	Sungai Mawang	-	111°45'58,2"	0°58'05,2"	1	Paket	33.150.000,00	33.150.000,00	DAU	CV. KRAKATAU	33.091.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		1. Pembangunan Halte Bus	Puting Kencana	Merakal Panjang	-	111°40'16"	1° 0'33"	1	Paket	33.150.000,00	33.150.000,00	DAU	CV. KRAKATAU	33.090.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Jasa Konsultasi Perencanaan Pengawasan Halte Bus	Terserab di Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	-	1	Paket	2.700.000,00	2.700.000,00	DAU	CV. GM KONSULTAN	2.664.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Halte Bus	Terserab di Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	-	1	Paket	4.200.000,00	4.200.000,00	DAU	CV. GM KONSULTAN	4.129.200,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perhubungan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Terkendala Identifikasi PAU	Mempercepat Proses Identifikasi	Kegiatan Swakelola
		<b>4 Belanja Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>280.000.236,90</b>	DAU	-	-	-	-	-	-	-	-
		Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PAU) Terserab di Kabupaten Kapuas Hulu :	1. Kacamatan Pulusbau Sabitan	-	-	-	-	80	Buah	687.500,00	55.000.000,00	DAU - APSDP	CV. TARISA	54.990.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
			2. Kacamatan Pulusbau Utara	-	-	-	-	237	Buah	379.147,84	90.000.236,90	DAU - APSDP	CV. TARISA	89.990.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
			3. Jembatan Kapuas Pulusbau Kota	-	-	-	-	64	Buah	1.562.500,00	100.000.000,00	DAU - APSDP	CV. TARISA	99.990.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Belanja Modal Pengadaan Tangga PAU Tinggi 11 Meter Standar PJA Untuk Pemeliharaan PAU	Pulusbau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	1	Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	DAU	CV. MITRA KOMPUTER	15.928.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Peralatan Tukang Listrik, Lengkap (Tang Ampere AC- DC Digital,Pendeteksi Anus Listrik,Bau Kotor,Ak-alat Listrik,Tool Perkakas Masak Listrik, Hand Tool Kit Set)	Pulusbau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	1	Set	7.000.000,00	7.000.000,00	DAU	CV. MITRA KOMPUTER	6.992.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Printer A3 sebagai Pendukung Kegiatan Perhubungan Jalan (Pemeliharaan)	Pulusbau Utara	-	-	-	-	1	Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	DAU	CV. MITRA KOMPUTER	11.995.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		2. Kegiatan Pengujian Berhala Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berhala Kendaraan Bermotor	Pulusbau Sabitan	-	-	-	-	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	DAU - APSDP	CV. DEVITA IZZATINDO	99.920.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengawasan Perhubungan Sungai dan Danau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Kegiatan Pembangunan Kebudayaan Sungai dan Danau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		<b>Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum :</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>970.800.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan Stasiun Tambatan Perahu	Bundul Hilir	Empangau Hulu	Pengalang	112°24'29,7"	0°44'47,6"	1	Unit	60.200.000,00	60.200.000,00	DAU	CV. SATRIA JAYA MANDIRI	60.120.034,26	Tertampir	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Pembangunan Stasiun Tambatan Perahu	Bundul Hilir	Sawau	Danau Puntu (Danau Sawau)	112°39'23,3"	0°45'48,1"	1	Unit	189.200.000,00	189.200.000,00	DAU	CV. SATRIA JAYA MANDIRI	189.147.362,14	Tertampir	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Pembangunan Stasiun Tambatan Perahu	Bundul Hilir	Empangau Hulu	Kuala Dua	112°22'34,6"	0°43'07,2"	1	Unit	60.300.000,00	60.300.000,00	DAU	CV. KRAKATAU	60.127.720,25	Tertampir	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Pembangunan Stasiun Tambatan Perahu	Embaluh Hilir	Nanga Embaluh	Lakana Jaya	112°38'58"	0°49'47"	1	Unit	81.700.000,00	81.700.000,00	DAU	CV. DUA PUTRA PALIN	81.600.419,50	Tertampir	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Pembangunan Stasiun Tambatan Perahu	Embaluh Hulu	Sadap	-	112°22'16"	1°10'28"	1	Unit	43.000.000,00	43.000.000,00	DAU	CV. ZEIN PUTRA PELITE	42.946.704,48	Tertampir	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Pembangunan Stasiun Tambatan Perahu	Embaluh Hulu	Past	-	112°27'18"	1°5'18"	1	Unit	34.400.000,00	34.400.000,00	DAU	CV. SAMTA KARYA MANDIRI	32.209.459,63	Tertampir	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Pembangunan Stasiun Tambatan Perahu	Jongkong	Jongkong Pasak	-	112°16'46"	0°39'44"	1	Unit	129.000.000,00	129.000.000,00	DAU	CV. RANANG DAMAU	128.948.059,79	Tertampir	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Pembangunan Stasiun Tambatan Perahu	Jongkong	Jongkong Pasak	Tanjung Cemai	112°16'46"	0°39'43"	1	Unit	55.900.000,00	55.900.000,00	DAU	CV. BINTANG SENTARUM	55.823.180,00	Tertampir	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Pembangunan Stasiun Tambatan Perahu	Pulusbau Sabitan	Kedamin Darat	-	112°56'2"	0°49'11"	1	Unit	60.200.000,00	60.200.000,00	DAU	CV. OSEA JAYA KONSTRUKSI	60.142.624,24	Tertampir	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Pembangunan Stasiun Tambatan Perahu	Pulusbau Utara	Sambus	-	112°57'25"	0°52'31"	1	Unit	86.000.000,00	86.000.000,00	DAU	CV. SINIR TEKNIK	85.671.476,74	Tertampir	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Pembangunan Stasiun Tambatan Perahu	Pulusbau Utara	Tanjung Benang	-	112°50'24"	0°55'36"	1	Unit	86.000.000,00	86.000.000,00	DAU	CV. SINIR TEKNIK	85.941.577,35	Tertampir	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Pembangunan Stasiun Tambatan Perahu	Selimbau	Nibung	-	112°10'26"	0°38'40"	1	Unit	86.000.000,00	86.000.000,00	DAU	CV. KRAKATAU	85.926.178,61	Tertampir	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Jasa Konsultasi Perencanaan Pengawasan Pembangunan Stasiun Tambatan Perahu	Terserab di Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	-	1	Paket	40.060.000,00	40.060.000,00	DAU	CV. GM KONSULTAN	40.015.500,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Stasiun Tambatan Perahu	Terserab di Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	-	1	Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	DAU	CV. GM KONSULTAN	59.895.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Kapuas Hulu,

SERLI S.Sos. M.M.  
Pembina Utama Muda  
NP. 19671201 198908 1 004

Jadi total realisasi Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.713.329.815 atau mencapai 94,24% sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 410.515.644

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu di susun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *Good Governance*.

Dengan demikian, pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, yang mengacu pada RPJMD/Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program serta kegiatan yang dapat memacu pembangunan di sektor transportasi, di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang



## B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).
3. Lebih meningkatkan mutu penyusunan program bidang perhubungan dengan mengacu pada ketentuan.
4. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia Perhubungan, baik melalui Diklat-diklat maupun penyuluhan-penyuluhan berjenjang, kajian-kajian terhadap prioritas pembangunan dalam bentuk survei, penyuluhan dan penertiban bagi pengguna dan penyedia jasa.
5. Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta *stakeholders* melalui rapat-rapat koordinasi teknis secara berkala dan berkesinambungan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik karena masih banyak daerah-daerah kecamatan yang belum ada sarana dan prasarana transportasi.
7. Peningkatan kemampuan SDM di bidang Perhubungan.
8. Peningkatan Kerja sama antar Bidang dan Sekretariat Dinas pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu.

9. Menciptakan tata usaha kantor yang bersih, akuntabel, transparan dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Akhirnya saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan LKjIP ini.

Putussibau, Februari 2025

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Kapuas Hulu



**SERLI, S.Sos.,M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671201 198908 1 004

C. Pagu Anggaran Semula dan Setelah Perubahan

11/6/24, 9:37 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD									
TAHUN ANGGARAN 2024																							
Nomor DPPA : DPPA/32.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024																							
SKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN																							
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																							
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T + 1	Jumlah										T+1				
									Tahun					Bertambah / (Berkurang)									
									Sebelum					Setelah						Rp		%	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN								Rp10.536.278.803,00	Rp1.005.796.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.542.074.703,00	Rp7.094.964.962,00	Rp4.196.349.286,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.291.314.248,00	( Rp250.760.455,00 )	( 2,22 )				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp10.536.278.803,00	Rp1.005.796.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.542.074.703,00	Rp7.094.964.962,00	Rp4.196.349.286,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.291.314.248,00	( Rp250.760.455,00 )	( 2,22 )				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			Rp10.536.278.803,00	Rp1.005.796.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.542.074.703,00	Rp7.094.964.962,00	Rp4.196.349.286,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.291.314.248,00	( Rp250.760.455,00 )	( 2,22 )				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp5.394.357.803,00	Rp40.096.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.434.453.703,00	Rp5.396.063.498,00	Rp40.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.436.513.498,00	Rp2.059.795,00	0,04				
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp9.949.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.949.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.949.000,00	Rp0,00	0,00				
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Rp1.408.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.408.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.408.000,00	Rp0,00	0,00				
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Rp1.518.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.518.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.518.000,00	Rp0,00	0,00				
2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Rp2.393.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.393.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.393.000,00	Rp0,00	0,00				

2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp2.393.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.393.000,00	Rp2.393.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.393.000,00	Rp0,00	0.00	
2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp3.102.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.102.000,00	Rp3.102.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.102.000,00	Rp0,00	0.00	
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp1.528.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.528.000,00	Rp1.528.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.528.000,00	Rp0,00	0.00	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp2.874.823.963,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.874.823.963,00	Rp3.046.129.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.046.129.000,00	Rp171.305.037,00	5.62	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp2.615.459.963,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.615.459.963,00	Rp2.833.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.833.385.000,00	Rp217.925.037,00	7.69	
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Pembastaraan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp258.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp258.480.000,00	Rp211.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.860.000,00	( Rp46.620.000,00 )	( 22.01 )	
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp884.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp884.000,00	Rp884.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp884.000,00	Rp0,00	0.00	
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp72.233.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.233.000,00	Rp94.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.210.000,00	Rp21.977.000,00	23.33	
2	15	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp72.233.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.233.000,00	Rp94.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.210.000,00	Rp21.977.000,00	23.33	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				Rp225.521.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.521.000,00	Rp104.213.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.213.000,00	( Rp121.308.000,00 )	( 116.40 )	
					Dana																

	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		Rp225.521.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.521.000,00	Rp104.213.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.213.000,00		( Rp121.308.000,00 )		( 118,40 )		
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Deserta Abribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.416.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.416.000,00		Rp28.416.000,00		100,00		
	2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.104.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.104.000,00	Rp2.358.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.358.000,00		( Rp3.746.000,00 )		( 158,86 )	
	2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.824.000,00	Rp625.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp625.000,00		( Rp4.199.000,00 )		( 671,84 )	
	2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Rp214.593.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.593.000,00	Rp72.814.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.814.000,00		( Rp141.779.000,00 )		( 194,71 )	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp674.857.000,00	Rp40.096.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp714.953.100,00	Rp768.930.000,00	Rp40.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp809.380.000,00		Rp94.426.900,00		11,67		
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Rp5.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.350.000,00	Rp5.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.350.000,00		Rp0,00		0,00	
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.435.000,00	Rp33.096.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.531.100,00	Rp13.585.000,00	Rp40.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.035.000,00		Rp9.503.900,00		17,59	
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Rp27.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.700.000,00	Rp40.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.775.000,00		Rp13.075.000,00		32,07	
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Dana Transfer	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau	Rp9.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.600.000,00		Rp0,00		0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T. 1	Jumlah													T+1
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
						Alokasi Umum																
2	15	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.560.000,00	Rp5.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.560.000,00	Rp0,00	0,00		
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp566.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp566.020.000,00	Rp672.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp672.260.000,00	Rp106.240.000,00	15,80		
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.470.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.470.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	( Rp13.470.000,00 )	( 269,40 )		
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp37.722.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.722.000,00	Rp16.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.800.000,00	( Rp20.922.000,00 )	( 124,54 )		
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.050.978.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.050.978.640,00	Rp940.413.009,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp940.413.009,00	( Rp110.565.631,00 )	( 11,76 )		
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0,00		
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp85.435.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.435.560,00	Rp83.160.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.160.560,00	( Rp2.275.000,00 )	( 2,74 )		

2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp960.543.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp960.543.080,00	Rp852.252.449,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp852.252.449,00	( Rp108.290.631,00 )	( 12,71 )
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp485.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp485.995.000,00	Rp432.219.489,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp432.219.489,00	( Rp53.775.511,00 )	( 12,44 )
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Rp485.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp485.995.000,00	Rp381.069.489,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp381.069.489,00	( Rp104.925.511,00 )	( 27,53 )
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Penalatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.150.000,00	Rp21.150.000,00	100,00
2	15	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	100,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Rp4.730.276.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.730.276.000,00	Rp1.462.617.750,00	Rp125.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.587.717.750,00	( Rp3.142.558.250,00 )	( 197,93 )
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			Rp94.111.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.111.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	( Rp94.111.000,00 )	( Infinity )
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp94.111.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.111.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	( Rp94.111.000,00 )	( Infinity )
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Rp4.155.123.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.155.123.000,00	Rp949.765.750,00	Rp125.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.074.865.750,00	( Rp3.080.257.250,00 )	( 286,57 )
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Batu Lintang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.900.000,00	Rp125.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00	Rp130.000.000,00	100,00
						Dana Transfer	Kab. Kapuas												

2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp4.155.123.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.155.123.000,00	Rp303.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.750.000,00	( Rp3.851.373.000,00 )	( 1267,94 )		
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp641.115.750,00	Rp641.115.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp641.115.750,00	Rp641.115.750,00	100,00		
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				Rp97.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.040.000,00	Rp37.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.950.000,00	( Rp59.090.000,00 )	( 155,70 )		
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp97.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.040.000,00	Rp37.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.950.000,00	( Rp59.090.000,00 )	( 155,70 )		
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				Rp106.882.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.882.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	( Rp91.882.000,00 )	( 612,55 )		
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp106.882.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.882.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	( Rp91.882.000,00 )	( 612,55 )		
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				Rp277.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.120.000,00	Rp109.902.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.902.000,00	( Rp167.218.000,00 )	( 152,15 )		
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp277.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.120.000,00	Rp109.902.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.902.000,00	( Rp167.218.000,00 )	( 152,15 )		
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00	100,00			



